

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmad, Baharuddin dan Ily Yanti, 2015, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Asshiddiqie, Jimly 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dewata, Mukti Fadjar Nusa dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ghofur, Abdul Anshori dan Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam (Dinamika dan perkembangannya di Indonesia)*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Hasan, Syaukani Rais, 2007, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hasyimzoem, Yusnani, dkk, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Huda, Ni'matul, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke VIII Rajawali Pers, Jakarta,

\_\_\_\_\_, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan gagasan penyempurnaan)*, UII Press, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan ke IV, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Indrati S., Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, Jilid 1, Yogyakarta.

Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution, 2015, *Pemikiran Politik Islam (Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer)*, Cetakan Ke-3, Prenada Media group, Jakarta.

Kansil, C.S.T. dan S.T. Kansil, 2004, *Pemerintah Daerah Di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*, , Cetakan ke II, Sinar Grafika, Jakarta.

Kelsen, Hans, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Cetakan ke VII, Penerbit Nusa Media, Bandung.

- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill, Jakarta.
- Mardani, 2010, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M.D., Moh. Mahfud, 2013, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan ke III, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhtada, Dani, 2014, *Peraturan Daerah Syariah di Indonesia: Penyebaran, Problem dan Tantangannya*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Muntoha, 2010, *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah*, Safiria Insania Press, Yogyakarta.
- Notonagoro, 1971, *Pantjasila Setjara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh Jakarta.
- Sholikin, M. Nur, dkk, 2009, *Awasi Peraturan Daerah berdayakan daerah (seri panduan pemantauan legislasi daerah)*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Rosidin, Utang 2015, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung.
- Rosyid, A. Al-Atok, 2015, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang.
- Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudi, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono, Maria Sri Wulan, 2010, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sumitro, Warkum 2016, *Hukum Islam ditengah dinamika sosial politik di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Takwin, Bagus dkk, 2016, *Studi Tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia (Pembelajaran dari 4 Daerah, Tasikmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro, dan Kupang)*, INFID, Jakarta..
- Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan *United Nations Development Programme (UNDP)* melalui proyek *Enhancing Communications, Advocacy and Public*

*Participation Capacity for Legal Reforms (CAPPLER Project)*, 2009,  
*Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*.

Yani, Ahmad , 2011, *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*, PT Raja  
Grafindo Persada, Jakarta.

### **Makalah/Karya Tulis Ilmiah**

Muntoha, 2008, “Otonomi Daerah dan perkembangan peraturan-peraturan daerah  
bernuansa syariah”, *Disertasi*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Diab, Ashadi L., 2006, “Penerapan Perda bernuansa syariat Islam (kajian tentang  
Perda bernuansa syariat Islam dan implementasinya terhadap hubungan  
antar agama)”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Roihan, Muhammad Irham 2016, “Analisis Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah  
Dalam Tata Hukum Di Indonesia” *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia,  
Yogyakarta.

Damayanti, Wahita, 2017, “Justifikasi Eksistensi Peraturan Daerah Bernuansa  
Syariat Islam dalam Ketatanegaraan Indonesia”, *Penulisan Hukum*,  
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hamdani, Randi 2017, “Kebijakan Publik dan Peraturan Daerah Syari’ah (Studi  
Tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata  
Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius di Kota Tasikmalaya)”, *Skripsi*,  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Al-Barbasy, Ma’mun Murod, “Islam dan Negara: Perdebatan dalam Pembuatan  
Peraturan Daerah Syariat di Kota Tasikmalaya” *Afkaruna*, Vol. 12, No. 2,  
Desember, 2016.

Darsiharjo, 2010, *Pembangunan Kepariwisata yang Ilmiah, Edukatif, dan  
Religius*, dalam Pidato Pengukuhan Prof. Dr. Dasiharjo, M.S., sebagai Guru  
Besar dalam Bidang Ilmu Geografi Sumberdaya Alam, Fakultas Pendidikan  
Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Indrayana, Denny, “Kompleksitas Peraturan Daerah Bernuansa Syari’at Perspektif  
Hukum Tata Negara”, *Jurnal Yustisia*, UNS, Surakarta, Edisi 81,  
September-Desember, 2010.

Manan, Bagir, “Ketentuan-ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-  
undangan dalam pembangunan hukum nasional”, *Makalah*, disampaikan  
pada pertemuan ilmiah tentang kedudukan biro-biro hukum/unit kerja  
department/LPND dalam pembangunan hukum, 1994, Jakarta.

Na'imah, Hayatun dan Nahjatul Mardhiah, "Peraturan Daerah Berbasis Syari'ah dan Hubungan Negara Agama dalam Perspektif Pancasila", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV No. 2, Desember, 2016.

Satori, Akhmad dan Taufik Nurohman, "Pergeseran Orientasi dan Ekspresi Elit Pesantren di Kota Tasikmalaya", *Jurnal Sosiologi Walisongo*, Vol. 2, No. 1, November, 2018.

Thontowi, Jawahir, "Hak Konstitusional Peraturan Daerah Syari'at Islam", *Al-Mawarid*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Edisi XVI, Desember, 2006.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Himpunan Peraturan-Peraturan Negara, Jogjakarta Tahun 1950).

Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman  
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan  
Arsitektur Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005  
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).

Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan  
Pemasukan, Penyimpanan Dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman  
Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2006 Nomor  
5).

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025  
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89).

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008-  
2012 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96).

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi Tahun  
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3).

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-  
2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140).

Peraturan Daerah kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai  
Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya (Lembaran  
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156).

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang  
Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi  
Tahun 2016 Nomor 3, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten  
Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Nomor : 274/2015).

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-  
2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 06 P/HUM/2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2017.

**Website**

- (A.M. Fatwa), “Perda Syari’ah dan Pluralisme Hukum di Indonesia”,  
[https://www.kompasiana.com/amfatwa/551235428133114b54bc6221/Peraturan\\_Daerah-syari-ah-dan-pluralisme-hukum-di-indonesia](https://www.kompasiana.com/amfatwa/551235428133114b54bc6221/Peraturan_Daerah-syari-ah-dan-pluralisme-hukum-di-indonesia) diakses pada hari Senin, 24 Juni 2019 pada pukul 19.00.
- (Andi Nugroho), “Hiburan Malam Dilarang di Bekasi”,  
<http://www.harnas.co/2018/05/20/hiburan-malam-dilarang-di-bekasi> diakses pada 24 Mei 2019 pukul 20.30.
- (Ely), “Prostitusi dibalik kedok tempat hiburan malam di Kabupaten Bekasi”,  
<http://www.radiosuarabekasi.com/berita-seputar-bekasi-raja/hiburan/5091-prostitusi-dibalik-kedok-tempat-hiburan-malam-di-kabupaten-bekasi.html>, diakses pada hari Selasa, 25 Juni 2019 pada pukul 19.00.
- (Ferdy Hardiyansah), “Ormas islam minta Pemkab Bekasi realisasikan Perda Pariwisata”,  
<http://www.urancikarang.com/v2/page.php?halaman=Ormas.islam.minta.Pemkab.Bekasi.realisasikan.Peraturan.Daerah.Pariwisata#.XOk9QFIzbIU> diakses pada 24 Mei 2019 Pukul 20.00.
- (Icun Sanjaya), “Dukungan masyarakat terhadap pemerintahan Kabupaten Bekasi untuk menegakkan Perda Nomor 3 tahun 2016 pasal 47 undang-undang kepariwisataan”,  
[http://cikarangtv.com/uncategorized/dukungan-masyarakat-terhadap-pemerintahan-kabupaten-bekasi-untuk-menegakkan-Peraturan\\_Daerah-nomor-3-tahun-2016-pasal-47-undang-undang-kepariwisataan/](http://cikarangtv.com/uncategorized/dukungan-masyarakat-terhadap-pemerintahan-kabupaten-bekasi-untuk-menegakkan-Peraturan_Daerah-nomor-3-tahun-2016-pasal-47-undang-undang-kepariwisataan/), diakses pada hari Sabtu, 22 Juni 2019 pada Pukul 20.15.
- (Ira Guslina Sufa), “DPR Tolak Pembentukan Polisi Syariah di Tasikmalaya”,  
<https://nasional.tempo.co/read/408932/dpr-tolak-pembentukan-polisi-syariah-di-tasikmalaya/full&view=ok>, diakses pada 24 Mei 2019 Pukul 20.00.
- (Kimsan Simare), “Perda THM, Cermin Hukum Kabupaten Bekasi Yang Masih Mengambang”,  
[http://postkeadilan.com/Peraturan\\_Daerah-thm-cermin-hukum-kabupaten-bekasi-yang-masih-mengambang/](http://postkeadilan.com/Peraturan_Daerah-thm-cermin-hukum-kabupaten-bekasi-yang-masih-mengambang/) diakses pada 24 Mei 2019 Pukul 20.30.
- (Lina), “Banyak Tempat Prostitusi di Bekasi Berkedok Spa”,  
<http://poskotanews.com/2017/09/16/banyak-tempat-prostitusi-di-bekasi-berkedok-spa/>, diakses pada hari Selasa, 25 Juni 2019 pada pukul 19.00.
- (Tanpa Penulis), “2016, Tempat Hiburan Malam di Bekasi Ditutup”,  
<https://beritadunia.net/berita-dunia/asia-tengah/2016-tempat-hiburan-malam-di-bekasi-ditutup/> diakses pada hari Kamis, 27 Juni 2019 pada pukul 09.00.
- (Tanpa Penulis), “Aksi Demo MAWIL FPI Bekasi Raya dan umat Islam mendukung PERDA ANTI MAKSIAT di kantor Pemkab Bekasi”,  
<https://www.facta-news.com/aksi-demo-mawil-fpi-bekasi-raya-dan-umat-islam->



*[mendukung-Peraturan Daerah-anti-maksiat-di-kantor-pemkab-bekasi/](#)*, diakses pada hari Sabtu, 22 Juni 2019 pada Pukul 20.00.

(Tanpa Penulis), “Penganut Agama di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014”, <https://jabar.kemenag.go.id/artikel-27169-> diakses pada 12 Juni 2019 Pukul 11.30.

(Tanpa Penulis), “Pengusaha Hiburan Malam di Kabupaten Bekasi Layangkan Gugatan Ke MA”, <https://beritacikarang.com/pengusaha-hiburan-malam-di-kabupaten-bekasi-layangkan-gugatan-ke-ma/>, diakses pada hari Sabtu, 22 Juni 2019, pada pukul 20.30.

(Tanpa Penulis), “Perda Injil Manokwari, antara sejarah kekristenan dan 'nuansa intoleransi””, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46813787> diakses pada 25 Mei 2019 pukul 21.00.

(Tanpa Penulis), “Sejarah Kabupaten Bekasi”, <http://www.bekasikab.go.id/#>, pada hari Senin, 1 Juli 2019, pada pukul 08.00.

(Waroy John), “Kontraversi Persoalan Peraturan Daerah tentang Penetapan Manokwari sebagai Kota Injil”, [https://www.kompasiana.com/waroy\\_john/550d81f9a33311091b2e3c62/kontraversi-persoalan-peraturan-daerah-tentang-penetapan-Manokwari-sebagai-kota-injil](https://www.kompasiana.com/waroy_john/550d81f9a33311091b2e3c62/kontraversi-persoalan-peraturan-daerah-tentang-penetapan-Manokwari-sebagai-kota-injil) diakses pada 25 Mei 2019 Pukul 21.00.

(Yah), “Datangi Kantor Bupati Bekasi, Fukhis Minta Perda Pariwisata Dijalankan Maksimal”, <https://jabarnews.com/read/2965/>, diakses pada hari Sabtu, 22 Juni 2019 pada pukul 20.00.